

KAJIAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PETANI PERKEBUNAN DI DALAM DAN DI SEKITAR HUTAN

SYAFRIL KEMALA

Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat

RINGKASAN

Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap pendapatan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan tergolong masih rendah. Untuk mengetahui (sejauh mana) keadaan sosial, ekonomi dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan kajian indikator sosial ekonomi petani perkebunan di dalam dan di sekitar hutan pada bulan Agustus sampai Oktober 2000. Penelitian dilaksanakan pada tiga pola pengelolaan hutan yaitu: (1) Pola Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan desa contoh Sukamulya dan Siabu, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, serta Desa Rambah Jaya, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau; (2) Pola Hutan Taman Nasional dengan desa contoh Andongrejo dan Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur; (3) Pola Hutan Sosial (Perum Perhutani) dengan Desa Kedung Urang, Kecamatan Cilacap, dan Desa Sawangan, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah. Penentuan desa contoh dilakukan secara sengaja (purposive sampling). Dari data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif, komparatif, serta didekati melalui indikator dan kriteria sosial ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan sosial ekonomi petani perkebunan di dalam dan di sekitar hutan masih rendah dibandingkan dengan masyarakat petani sawah dan petani lainnya. Pendapatan rata-rata petani perkebunan berkisar antara Rp 360 860.00 sampai dengan Rp 523 550.00. Kisaran distribusi pendapatan (Gini ratio) antara 0.295 sampai dengan 0.430. Dari tiga pola pengelolaan hutan, Desa Hutan Taman Nasional lebih baik dibandingkan dengan 2 pola lainnya, dimana tingkat pendapatannya Rp. 432 000.00 dan Gini ratio 0.320 serta sarana dan prasarana dalam kriteria sedang.

Kata kunci: Sosial ekonomi, petani, hutan, pendapatan, Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Indonesia

ABSTRACT

Socioeconomic studies on estate farmers living in the forest and surrounding forest area

The contribution of estate subsector to the income of the farmers living in the forest and in the surrounding area is still low. This study was carried out socioeconomic and their roles in improving their welfare. The study was conducted from August to October 2000 in three forest management systems: (1) system of Hak Pengusahaan Hutan (HPH) which was represented by Sukamulya and Siabu villages, Bangkinang, Kampar District, and Rambah Jaya Village, Rambah Hilir, Rokan Hulu District; (2) System of Hutan Taman Nasional which was represented by Andongrejo and East Java Province; (3) System of Hutan Sosial (Perum Perhutani) which was represented by Kedung Urang Village, Cilacap Subdistrict, and Sawangan Village, Jeruk Legi Subdistrict, Cilacap District, Central Java Province. Sample villages were chosen through purpose sampling method. The data were analyzed descriptively and comparative and approached through socioeconomic indicators and criteria. The results of the research indicated that the socioeconomic condition of the estate farmers living in the forest and in the surrounding area was lower compared to those of the area was lower compared to those of the rice farmers and others farmers. The average income of the estate farmers ranged between Rp 360 860.00 and Rp 523 550.00. The range of income distribution (Gini ratio) was 0.295 to 0.430. Out of the three forest management systems, the village of Hutan Taman Nasional was better than those of two other systems, where the income level was Rp 432 000.00 Gini ratio was 0.320; structure and infrastructure was moderate.

Key words: Social economic, farmers, forest, income, Riau, Central Java, East Java, Indonesia

PENDAHULUAN

Di dalam perkembangannya, sistem pengelolaan hutan yang partisipatif melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan belum berjalan seperti yang diharapkan. Berbagai konflik yang terjadi antara pemilik Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan masyarakat sekitarnya, menandakan masih terjadi kesenjangan antara pengelola hutan dengan masyarakat petani. Masyarakat petani perkebunan yang sebagian besar hidupnya sangat bergantung pada sumberdaya hutan (ANON., 1996), memerlukan jaminan kepastian dalam mengelola kehidupannya.

Pengelolaan sumberdaya hutan secara terarah melibatkan beberapa pelaku pengguna dalam pemanfaatannya. Pemerintah, swasta dan masyarakat setempat sangat berpengaruh terhadap tujuan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Di dalam pengelolaannya faktor kelembagaan memegang peranan penting dalam mempersatukan tujuan dan persepsi kearah pemanfaatan sumberdaya hutan secara lestari. WURARAH (1998) menyatakan bahwa pemanfaatan hutan melibatkan manusia sebagai pelaku baik yang dilakukan oleh pemegang konsesi maupun masyarakat setempat yang dapat membentuk suatu kelembagaan yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

GOLDSMITH dan BRINKERHOFF (dalam WURARAH, 1998), menyatakan bahwa kelembagaan mencakup berbagai aturan dan prosedur tentang bagaimana corak tingkah laku manusia dalam melaksanakan sesuatu aturan-aturan dan organisasi yang mendapatkan suatu status atau pengesahan (*legitimasi*) tertentu. Wujud dari kelembagaan tersebut berupa wadah atau organisasi yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi dan budaya.

Di dalam usaha meningkatkan peran kelembagaan sebagai suatu wadah untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan sosial, peran serta masyarakat perlu dilibatkan secara nyata. SUDHARTO (1996) menyatakan bahwa pembangunan sebagai suatu proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya mengandung arti bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses itu, masyarakat perlu berperan serta dan peran serta (*empowerment*) merupakan suatu bagian proses. Peran pemerintah dalam hal ini diperlukan guna meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam kelembagaan. Salah satu usaha pemerintah dalam menunjang petani perkebunan di pedesaan adalah menumbuhkembangkan berbagai kelembagaan di dalam masyarakat desa antara lain membentuk kelompok-kelompok tani (ANWAR dalam SUGIARTO, 1996).

Dalam hubungan dengan pengelolaan sumberdaya hutan, sebenarnya persekutuan adat setempat telah mengatur cara-cara alokasi pemanfaatan yang lestari dalam suatu tatanan kelembagaan yang dibangun dari pengalaman yang panjang secara turun temurun. Di dalam pemanfaatan hutan yang didominasi oleh pihak HPH, masyarakat yang berdiam di sekitar hutan terutama petani perkebunan kurang merasakan manfaat yang diperoleh. Pemanfaatan hutan dengan sistem berkelanjutan dapat tercapai bila anggota masyarakat dan kelembagaan masyarakat berkembang lebih cepat sehingga secara dinamik peningkatannya harus lebih tinggi dibanding dengan sumber daya hutan (relatif tetap cenderung berkurang) dan nilai ekonomi finansial dari sumberdaya tersebut cenderung terkena deprisiasi. Kurang dihormatinya kearifan tradisional dari masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya telah mendorong deprisiasi sumberdaya tersebut. Pemanfaatan hutan yang tanpa memperhitungkan dampaknya (*externality*) akan menimbulkan biaya sosial yang besar sehingga menimbulkan kelembagaan yang ada baik yang formal maupun informal. Kelembagaan tersebut tentunya harus didukung oleh masyarakat atau dengan memperkuat hak-hak adat yang ada sehingga masyarakat hutan merasa memiliki sumberdaya hutan. Makin besar permintaan masyarakat terhadap sumberdaya hutan akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat petani (WURARAH, 1998).

Menurut CHAMBER (1994), pembangunan dalam bidang pertanian termasuk bidang kehutanan perlu membalik hubungan kekuasaan dengan menempatkan masyarakat menjadi inti pembangunan agar pembangunan dapat berkelanjutan (*sustainability*). COEN REYNTJES *et al.* (1999) memberikan arti berkelanjutan sebagai berikut :

- a. Makna berkelanjutan yang utama adalah bertahan hidup (*survival*) apa yang dipakai harus diganti dan bahwa generasi baru manusia masih bertahan hidup dengan tingkat hidup yang layak dengan ekosistem yang masih memberikan hasil jangka panjang.
- b. Makna berkelanjutan mempunyai dimensi sosial, ekonomi dan emosional. Berkelanjutan sosial mengacu pada bertahannya keluarga-keluarga dan masyarakat pedesaan yang bertani sepanjang zaman. Berkelanjutan ekonomi mengekspresikan adanya: "penguasaan ekonomi" yang mampu mendukung kehidupan keluarga mereka.
- c. Berkelanjutan harus dipahami sebagai suatu proses yang dinamis, dalam arti bahwa akan selalu ada permintaan yang meningkat akan bahan baku dan pangan.
- d. Berkelanjutan harus diartikan secara komprehensif : (1) eksploitasi sumber daya harus ditolerir; (2) mobilitas ekonomi, kepentingan (konglomerat) tidak dapat mendominasi kepentingan rakyat; (3) kesamaan dalam mengontrak sumberdaya; (4) produk pertanian yang manusiawi.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana keadaan sosial, ekonomi masyarakat petani perkebunan di dalam dan di sekitar hutan. Melalui pendekatan kriteria dan indikator sosial ekonomi akan dapat dilihat peran serta petani perkebunan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, demikian pula sejauhmana bentuk pengelolaan yang ada dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi petani perkebunan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada tahun 2000 dan pengumpulan data (sekunder dan primer) dimulai Agustus 2000. Penelitian dilakukan pada tiga propinsi yaitu Propinsi Riau untuk pola HPH, Propinsi Jawa Tengah (Purwokerto dan Cilacap) untuk pola Hutan Sosial, dan Propinsi Jawa Timur (Meru Betiri) untuk pola Taman Nasional. Berhubung kesulitan mencari informasi dan lokasi desa yang terletak di dalam hutan, maka lokasi desa penelitian hanya dilakukan pada desa disekitar hutan atau daerah penyangga Taman Nasional.

Metode Pengumpulan Data

Daerah contoh terdiri atas tiga bentuk pengelolaan hutan, yaitu : 1) Pola Hak Pengusahaan Hutan (HPH); 2) Pola Hutan Taman Nasional; 3) Pola Hutan Sosial (Perhutani). Penentuan daerah contoh dilakukan secara sengaja (*purposive random sampling*).

Untuk pola Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Propinsi Riau diambil 3 desa pada 3 Kecamatan dan 2 Kabupaten, yaitu : 1) Desa Sukamulya dan Desa Siabu, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar; 2) Desa Rambah Jaya di Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu. Untuk pola Hutan Taman Nasional di Propinsi Jawa Timur diambil 2 Desa, 2 Kecamatan, 1 Kabupaten, yaitu 1) desa Andongrejo di Kec. Tempurejo, Kab. Jember; 2) desa Sanenrejo di Kec. Tempurejo, Kab. Jember. Untuk pola Hutan Sosial (Perhutani) diambil 2 desa, 2 Kecamatan dan 2 Kabupaten yaitu : 1) Desa Kedung Urang di Kec. Gumelar, Kab. Banyumas; 2) desa Sawangan di Kec. Jeruk Legi, Kab. Cilacap.

Pemilihan desa dibedakan atas tingkat kemajuan kelembagaan terkait yaitu antara yang sudah maju dan belum maju. Desa Andong Rejo dan desa Sawangan dianggap lebih maju tingkat kelebagaannya dibanding dengan desa Sanenrejo dan desa Kedung Urang. Tiap desa diambil 20 petani contoh secara acak bebas dan jumlah petani keseluruhan yang diambil 140 petani.

Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif, komparatif dan tabulasi. Perhitungan dan analisis kriteria dan indikator dilakukan secara matematis, statistik dan ekonometrika. Motivasi petani dan persepsinya terhadap kelembagaan yang ada dianalisis secara deskriptif dan komparatif.

Indikator dan metoda perhitungannya ditunjukkan seperti formula dan persamaan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator, Formula dan Kriteria
Table 1. Indicator, formula, and criteria

Indikator	Formula	Kriteria
Pendapatan	$P_b = \sum (P_i - C_i)$ Dimana : P _b = Jumlah pendapatan bersih P _i = Pendapatan kotor C _i = Biaya ke i	$P_b < KFM$ = kurang layak KFM = Kebutuhan Fisk Minimum
Distribusi Pendapatan	$KG = \sum \frac{(X_{i+1} - X_i)(Y_i + Y_{i+1})}{n}$ dimana : KG = Koefisien Gini X _i = Proporsi rumah tangga dalam kelas i Y _i = Proporsi pendapatan rumah tangga dalam kelas i	KG < 0,4 = ketimpangan rendah KG 0,4-0,5 = ketimpangan moderat KG > 0,5 = ketimpangan tinggi
Sarana dan Prasarana ekonomi		
a. Panjang Jalan	Kilometer	Semakin panjang semakin baik
b. Kualitas jalan	Aspal, pengerasan batu, jalan tanah (km)	Aspal > pengerasan dan batu > jalan tanah
c. Banyaknya kendaraan pribadi	Buah (jumlah)	Semakin banyak semakin baik
d. Pasar	Buah (jumlah)	Ada/tidak ada
e. Toko/Warung	Buah (jumlah)	Semakin banyak semakin baik
Tenaga Kerja		
a. Dependency ratio	$DR = \frac{PUK}{PUK}$ Dimana : DR = dependency ratio PDUK = penduduk diluar usia kerja PUK = penduduk usia kerja	Semakin besar DR semakin baik
b. Tingkat urbanisasi	Kesempatan kerja semakin sempit	Semakin tinggi urbanisasi smakin rendah lapangan kerja
c. Partisipasi angkatan kerja	$TPAK = \frac{AK}{PUK} \times 100\%$ Dimana : TPAK = partisipasi angkatan kerja AK = jumlah angkatan kerja PUK = jumlah penduduk usia kerja	Semakin besar TPAK semakin baik
d. Tingkat pengangguran - Terbuka	$PT = \frac{TB}{K35} \times 100\%$	
- Setengah penganggur	$SP = \frac{PB}{K35} \times 100\%$ Dimana : SP = setengah penganggur PT = penganggur terbuka K35 = bekerja kurang 35 jam per minggu PB = penduduk bekerja SPK = setengah penganggur kritis TB = Jumlah penduduk tidak bekerja/sedang mencari kerja	Semakin tinggi PT dan SP pemanfaatan SDM semakin rendah
Pendidikan		
a. Buta Aksara	$TBA = \frac{BA}{P} \times 100\%$ Dimana : TBA = tingkat buta aksara BA = jumlah penduduk buta aksara P = jumlah penduduk 10 tahun keatas	Semakin rendah TBA semakin baik kualitas penduduk
b. Tingkat pendidikan	$TP = \frac{TPT}{P} \times 100\%$ Dimana : TP = tingkat pendidikan	Semakin banyak penduduk berpendidikan tinggi yang semakin baik kondisi pendidikan di daerah itu.

Lanjutan Tabel 1 *Continuation Table 1*

Indikasi	Formula	Kriteria
	TPT = penduduk menurut tingkat pendidikan P = penduduk 10 tahun keatas M	
c. Sarana pendidikan	$SPT = \frac{M}{R}$ Dimana : SPT = sarana pendidikan fuik M = banyaknya murid SD/SMTP/SMTA R = banyaknya ruang kelas	Semakin besar rasio SPF semakin kurang efektif
Sarana dan Prasarana Sosial		
a. Tempat ibadah	Buah	Ada tidak ada
b. Tempat olah raga	Jumlah	Semakin banyak semakin baik
c. Tempat rekreasi	Jumlah	Semakin banyak semakin baik
Kesehatan		
a. Sarana Kesehatan	$RSK = \frac{SK}{P}$ Dimana : RSK = Rasio sarana kesehatan SK = banyaknya sarana kesehatan P = banyak penduduk	Semakin tinggi rasio RSK berarti semakin baik
b. Tenaga Kesehatan	$RTK = \frac{TK}{P}$ Dimana : RTK = rasio tenaga kesehatan TK = banyak tenaga kesehatan P = banyak penduduk	Semakin tinggi RTK semakin baik
c. Angka Kematian Bayi	$AKB = \frac{1000 BL}{P}$ dimana : AKB = angka kematian bayi KB = Kematian bayi dibawah satu bulan BL = bayi yang lahir	Semakin kecil AKB, semakin baik
Perumahan		
a. Atap Rumah	Genteng, sirap, seng/asbes	Genteng/sirap lebih baik dari seng/asbes
b. Dinding rumah	Tembok, kayu, bambu	Tembok > kayu > bambu
c. Lantai	Tegel/keramik, plester, tanah	Tegel/keramik > plester > tanah
d. Sanitasi	MCK sendiri, MCK umum, tanpa MCK	MCK sendiri > MCK umum > tanpa MCK
Kelembagaan		
a. LKMD	Jumlah	Berfungsi/tidak
b. Koperasi	Jumlah	Berfungsi/tidak
c. Lembaga sosial/ LMD	Jumlah	Berfungsi/tidak
d. Lembaga gotong royong	Jumlah	Berfungsi/tidak
e. LSM	Jumlah	Berfungsi/tidak
Partisipasi Masyarakat		
a. Keterlibatan anggota masyarakat	Jumlah	Besar/kecil
b. Keterlibatan Pimpinan Informal	Jumlah	Besar/kecil
c. Keterlibatan Kelompok Tani	Jumlah	Besar/kecil
d. Keterlibatan Penyuluh	Jumlah	Besar/kecil
e. Keterlibatan Petugas Pendamping	Jumlah	Besar/kecil

Sumber : Pedoman Survey Sosial Ekonomi Kehutanan Indonesia, Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1998
Sources : Guidance for socioeconomic survey of Indonesian forestry, the Ministry of Forestry and Estate, 1998

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat petani perkebunan dalam dan sekitar hutan makin mendesak untuk didekati dengan banyak aspek, dikarenakan kaitan kedepan dan kebelakang yang sangat penting. Keadaan perambahan dan "ilegal logging"

tidak terlepas dari *in-situ* dan *ex-situ* masyarakat, dalam arti masyarakat dihulu (dalam dan sekitar hutan) dan masyarakat industri kehutanan yang ada dihilir.

Perilaku petani perkebunan dalam dan sekitar hutan, akan sangat ditentukan oleh faktor sosial ekonominya secara menyeluruh. Untuk itu kajian utuh dan menyeluruh melalui kriteria dan indikator ekonomi sangat diperlukan (ANON., 1998).

Aspek Ekonomi

Untuk melihat aspek ekonomi petani perkebunan di dalam dan di sekitar hutan diukur kriteria dan indikator yaitu : pendapatan, distribusi pendapatan (Gini rasio), prasarana perhubungan, sarana dan prasarana ekonomi rakyat. Adapun kriteria dan indikator ekonomi pada ketiga pola pengelolaan hutan tersebut disajikan seperti pada Tabel 2.

Dari besarnya tingkat pendapatan rata-rata petani perkebunan ternyata tertinggi (Rp. 523 550) pada desa Hutan HPH Hutan Alam (Riau) berikutnya Rp. 423 002.00 pada desa Hutan Taman Nasional. Pendapatan terendah (Rp. 360 860.00) adalah di desa Hutan Sosial (Jawa Tengah). Pendapatan disini adalah merupakan pendapatan bersih, merupakan penerimaan kotor dikurangi biaya per kegiatan usaha. Tingkat pendapatan (Rp. 360 860.00) sesuai dengan kriteria yang ada lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan fisik minimum (KFM) yang setara dengan upah minimum rata-rata (UMR) di Jawa Tengah (Rp. 240 000.00).

Tabel 2. Indikator dan kriteria ekonomi petani perkebunan pada 3 pola pengelolaan hutan

Table 2. Economic indicators and criteria of the farmers living in the forest in the 3 forest management systems

Indikator Indicators	Kriteria Criteria		
	Desa Hutan Sosial (Jawa Tengah)	Desa Hutan Taman Nasional (Meru Betiri- Jatim)	Desa Hutan HPH Hutan Alam (Riau)
Pendapatan penduduk Income inhabit (Rp)	360 860	432 002	523 550
Distribusi pendapatan Gini ratio/income distribution	0.295	0.320	0.43
Sarana Prasarana			
- Panjang jalan (km)	8,2	10,2	11,75
- Kualitas jalan (aspal, koral, tanah)	koral	koral	tanah
- Banyaknya kendaraan pribadi	15	14	8
Sarana dan Pra- sarana Ekonomi Rakyat			
- Pasar	1	1	1
- Toko	6	8	5
- Warung	5	20	11

Sumber : Data primer
Source : Primary data

Menurut MUBIARTO (1998), ada kecenderungan bahwa 10% penduduk disekitar hutan termasuk kelompok dibawah garis kemiskinan. Dengan kriteria Gini rasio yang relatif kecil (0.295) menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan di desa ini cukup merata, maka cukup beralasan masyarakat yang ada di bawah garis kemiskinan $\leq 10\%$. Sejalan dengan itu menurut SUTANTO, 2000 bahwa menurunnya Gini Ratio disebabkan oleh pengeluaran rata-rata kelas bawah yang meningkat dan pengeluaran kelas atas yang relatif menurun.

Dari analisis pendapatan yang dilakukan pada tiga pola tersebut ternyata yang pengaruhnya nyata adalah jenis dan sumber pendapatan. Ternyata sumber dan jenis pendapatan dari non pertanian dan perkebunan berpengaruh besar terhadap besarnya pendapatan, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.

Desa Hutan Taman Nasional Meru Betiri (Jatim) pendapatan rata-rata penduduk Rp. 432 002.00 dengan angka Gini Rasio 0.320. Pendapatan pada desa hutan tersebut diatas kebutuhan fisik/UMR Jawa Timur (Rp. 240 000/bulan). Angka Gini Rasionya adalah 0.320 dan lebih besar dibandingkan angka Gini Rasio desa Hutan Sosial (0.295). Cukup beralasan pula bila angka penduduk dibawah garis kemiskinan di desa Hutan Taman nasional (12.3%) dan lebih besar dari Hutan Sosial. Demikian pula di desa Hutan HPH Hutan Alam (Riau) ternyata tingkat pendapatan rata-rata adalah Rp. 523 550 (tertinggi). Seperti sudah dikemukakan bahwa besar kecilnya pendapatan ternyata sangat dipengaruhi oleh jenis dan sumber pendapatan. Ternyata di desa HPH - Hutan Alam kontribusi pendapatan terbesar selain dari sektor non pertanian adalah dari sektor perkebunan (karet) dan hutan (madu). Namun pada desa Hutan HPH hutan alam ini angka Gini Rasionya cukup tinggi yaitu 0.43; tergolong kriteria tingkat ketimpangan moderat (DUMAIRY, 1999). Bila dikaitkan dengan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan di daerah ini (17.3%) dari hasil analisis ini dapat mendukung.

Indikator sarana dan prasarana perhubungan pada ketiga pola desa ternyata untuk panjang jalan terdapat pada desa Hutan HPH (11.75 Km), namun kriterianya adalah jalan tanah. Sedangkan pada desa Hutan Sosial dan Hutan Taman Nasional adalah jalan koral. Dalam aktivitas ekonomi sudah barang tentu kriteria jalan koral lebih menunjang

Tabel 3. Jenis dan sumber pendapatan pada 3 pola pengelolaan hutan
Table 3. Income source of 3 forest management systems

Sumber pendapatan Income source	Desa Hutan Sosial (Jawa Tengah)	Desa Hutan Taman Nasional (Meru Betiri- Jatim)	Desa Hutan HPH Hutan Alam (Riau)
Non Pertanian	60.3%	40.7%	32.2%
Sawah/Pangan	11.8%	17.2%	14.4%
Perkebunan	21.2%	23.4%	27.5%
Hutan	6.7%	19.1%	25.8%

Sumber : Data primer
Source : Primary data

ekonomi desa. Dengan demikian juga pengaruh terhadap keberadaan mobil pribadi, ternyata di daerah Hutan Sosial dan Hutan Taman Nasional lebih banyak. Hal tersebut dikarenakan tersedianya jalan koral dan bukan karena pengaruh pendapatan.

Pada aspek sarana dan prasarana ekonomi rakyat (pasar, toko, warung) ternyata di desa Hutan Sosial dan Hutan Taman Nasional dengan kriteria lebih banyak. Hal itu dikarenakan tersedianya prasarana perhubungan lebih baik dan populasi penduduk lebih banyak dan padat. Seperti diketahui dengan banyak toko dan warung berarti bahwa keberadaan ekonomi di daerah itu lebih terbuka, transaksi (uang beredar) di desa itu lebih banyak.

Aspek Sosial dan Budaya

Indikator sosial dan budaya yang ingin dilihat mencakup : a) Tenaga kerja dengan indikator : dependency ratio, tingkat partisipasi, jumlah angkatan kerja, urbanisasi, pengangguran terbuka dan setengah pengangguran; b) Pendidikan dengan indikator : tingkat buta aksara, tingkat pendidikan, sarana pendidikan fisik dan sarana tenaga kerja pengajar; c) Prasarana Sosial dengan indikator : tempat ibadah, tempat olahraga dan tempat rekreasi. Adapun kriteria dan indikator ditujukan seperti pada Tabel 3.

Seperti ditunjukkan pada Tabel 4 bahwa tingkat D.R. (dependency ratio) penduduk terbesar terjadi pada desa Hutan HPH (49.30), sedangkan pada desa Hutan Taman Nasional (40.4) dan desa Hutan Sosial (37.3). Menurut

kriteria umum semakin besar DR (dependency ratio) adalah semakin tidak baik. Hal ini berarti bahwa beban penduduk yang menjadi tanggungan penduduk usia kerja ternyata lebih besar di desa Hutan HPH dibandingkan dengan kedua desa hutan lainnya. Berarti bahwa beban masyarakat lebih tinggi.

Sedangkan yang berkaitan dengan tingkat produktivitas angkatan kerja dapat dilihat dari partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja dari ketiga pola ternyata tertinggi di desa Hutan Taman Nasional (70.99). Berarti produktivitas tenaga di desa Hutan Taman Nasional lebih tinggi dibandingkan dengan desa lainnya. Hal tersebut karena usia kerja muda di desa Hutan Sosial lebih tinggi.

Indikator urbanisasi, ternyata di desa Hutan Sosial (14.5) dan Hutan Taman Nasional (11.40) ternyata lebih besar dibandingkan dengan desa Hutan HPH (7.30). Hal ini ternyata dipengaruhi oleh kota-kota besar di Jawa (Surabaya, Semarang dan Jakarta). Demikian pula pengangguran terbuka dan setengah terbuka ternyata di desa Hutan HPH lebih besar (18.0) dibandingkan pada kedua desa lainnya. Hal ini dimengerti karena terbatasnya kegiatan ekonomi serta rendahnya dukungan sarana pembangunan.

Aspek pendidikan, tingkat buta aksara masih terdapat pada desa hutan dan terbesar terjadi pada desa Hutan HPH (3.4). Hal ini merupakan lampu kuning yang harus dicermati dalam perbaikan SDM. Sedangkan tingkat pendidikan yaitu jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan formal, ternyata terbesar (40.3) di desa Hutan Taman Nasional dan kedua terbesar di desa Hutan Sosial (36.25), dan terendah di desa Hutan HPH. Hal ini dikarenakan rendahnya fasilitas pendidikan. Indikator tersebut dapat dilihat dari rasio sarana pendidikan fisik (53.5) dan sarana pendidikan dengan tenaga pengajar (57.67).

Prasarana sosial lainnya berupa tempat ibadah, tempat olahraga dan tempat rekreasi ternyata pada 3 desa hutan memiliki tempat ibadah (Mesjid dan Langgar) yang cukup memadai. Berarti tingkat ketaatan beragama cukup baik. Namun sarana olahraga tidak dimiliki oleh desa Hutan HPH, demikian pula sarana rekreasi tidak dimiliki oleh ketiga pola desa hutan tersebut.

Aspek Lingkungan

Indikator dan kriteria aspek lingkungan masyarakat desa Hutan terdiri dari : (a) Kesehatan (rasio sarana kesehatan, rasio tenaga kesehatan, angka kematian bayi); (b) Perumahan (atap rumah, dinding rumah, sanitasi rumah); (c) Keamanan desa hutan (frekuensi dan kerugian). Indikator dan kriteria aspek lingkungan pada tiga pola pengelolaan hutan diperlihatkan seperti pada Tabel 5.

Tabel 4. Kriteria dan indikator sosial budaya petani perkebunan desa Hutan Sosial, desa Hutan Taman Nasional dan desa Hutan HPH.

Table 4. Socioculture indicators and criteria of the farmers in the villages of Hutan Sosial, Hutan Taman Nasional, and Hutan HPH

Indikator Indicators	Kriteria Criteria		
	Desa Hutan Sosial (Jawa Tengah)	Desa Hutan Taman Nasional (Meru Betiri- Jatim)	Desa Hutan HPH Hutan Alam (Riau)
Tenaga Kerja			
-Dependency ratio (DR)(%)	37.30	40.40	49.30
-Partisipasi A.K. (%)	65.81	70.99	60.62
-Urbanisasi (%)	14.50	11.40	7.30
-Pengangguran terbuka (%)	14.50	15.00	18.00
-Setengah terbuka (%)	17.00	16.90	12.00
Pendidikan			
-Tingkat buta aksara (%)	2.10	2.20	3.40
-Tingkat pendidikan (%)	36.25	40.30	30.12
-Sarana pendidikan (%)	39.20	38.30	53.50
-Tenaga pengajar (%)	37.50	35.40	57.67
Prasarana sosial			
-Tempat ibadah	+	+	+
-Tempat olahraga	+	+	-
-Tempat rekreasi	-	-	-

Sumber : Data primer
Source : Primary data

Tabel 5. Kriteria dan indikator lingkungan petani perkebunan dalam dan sekitar hutan pada 3 pola pengelolaan hutan

Table 5. Environment indicators and criteria of the farmers living in the forest and surrounding area in the 3 forest management systems

Indikator Indicators	Kriteria Criteria		
	Desa Hutan Sosial (Jawa Tengah)	Desa Hutan Taman Nasional (Meru Betiri - Jatim)	Desa Hutan HPH Hutan Alam (Riau)
Kesehatan			
- Ratio sarana kesehatan	6 : 4258	7 : 5717	1 : 1451
- Ratio tenaga kesehatan	11 : 4258	10 : 5717	1 : 1451
- Angka kematian bayi	1.3	1.1	2.1
Perumahan			
- Atap rumah	83.0	85.3	94.0
- Dinding rumah	73.5	75.1	69.2
- Lantai rumah	70.5	73.2	64.0
- Sanitasi rumah	88.2	87.3	76.0
Keamanan			
- Keamanan desa	sedang	sedang	kurang
- Keamanan hutan	kurang	kurang	kurang

Sumber : Data primer dan sekunder
Source : Primary and secondary data

Aspek kesehatan yang mencakup sarana kesehatan dan tenaga kesehatan di desa Hutan HPH adalah dengan kriteria sangat rendah dibandingkan pada kedua desa Hutan Sosial (Jateng) dan desa Hutan Taman Nasional (Jatim). Di desa hutan HPH ternyata setiap 1 buah klinik melayani 1451 orang. Demikian pula untuk tenaga kesehatan setiap 1 orang tenaga kesehatan melayani 1451 orang penduduk. Hal ini dikarenakan mobilitas pembangunan klinik dan tenaga kesehatan yang tersedia cukup banyak di Jawa dibandingkan diluar Jawa. Angka kematian bayi tertinggi di desa Hutan HPH (2.1%). Masalah kesehatan juga melekat pada faktor kebudayaan, di daerah tertentu di luar pulau Jawa MCK tidak merupakan suatu keperluan. Buang air dikali adalah suatu dianggap biasa.

Indikator rumah adalah salah satu aspek lingkungan. Ternyata untuk atap rumah desa Hutan HPH di Riau atap rumahnya terbuat dari seng. Sehingga agak sulit dibedakan dengan desa lainnya. Dinding rumah dalam hal ini adalah bata ternyata kriteria terbaik terjadi di desa Hutan Taman Nasional (75.1%) dan terendah di desa Hutan HPH. Sedangkan lantai rumah, dimana kriterianya adalah plester semen. Ternyata kriteria tertinggi di Hutan Taman Nasional (73.2%). Demikian pula sanitasi rumah dalam hal ini kriterianya adalah pemakaian MCK ternyata tertinggi di desa Hutan Sosial (Jateng).

Aspek lainnya adalah keamanan dan kriterianya pada desa Hutan Sosial dan Hutan Taman Nasional adalah sama. Sedangkan indikator keamanan hutan pada ketiga desa adalah sama yaitu pada kriteria kurang.

Tabel 6. Kriteria dan indikator kelembagaan masyarakat dalam dan sekitar hutan pada 3 pola pengelolaan hutan

Table 6. Organization indicators and criteria of the farmers living in the forest and surrounding area in the 3 forest management systems

Indikator Indicators	Kriteria Criteria		
	Desa Hutan Sosial (Jawa Tengah)	Desa Hutan Taman Nasional (Meru Betiri - Jatim)	Desa Hutan HPH Hutan Alam (Riau)
LKMD	+	+	+
Koperasi	-	-	-
LMD	-	-	-
Lembaga Adat	Kurang	Kurang	Kuat
Kelompok Tani	+	+	+

Sumber : Data primer
Source : Primary data

Aspek Kelembagaan dan Dinamika Kelompok Tani

Indikator dan kriteria kelembagaan yang diukur meliputi : LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa), Koperasi, LMD, Lembaga Adat dan Kelompok Tani/Hutan. Adapun indikator dan kriteria dari lembaga-lembaga tersebut ditunjukkan pada Tabel 6.

Pada 3 pola desa hutan memperlihatkan eksistensi kelembagaan yang sama. Yang ada dan berfungsi adalah LKMD, Lembaga Adat dan Kelompok Tani. Di Desa Hutan HPH (Riau) ternyata pengaruh lembaga adat sangat kuat sekali. Sumber hukum nikah-kawin dan harta warisan serta hak-hak atas tanah diatur kuat oleh lembaga adat. Tidak demikian di desa Hutan Sosial (Jawa Tengah) dan desa Hutan Taman Nasional (Jawa Timur) ikatan-ikatan adat tidak banyak berperan bahkan lembaga adat kurang berfungsi, dikarenakan masyarakatnya sudah banyak campuran.

Kelembagaan kelompok tani di desa Hutan Sosial dan Taman Nasional eksistensinya sangat berperan dalam dinamika petani. Hal ini dimungkinkan rasa kebersamaan dalam usaha tani dan sebagian besar usahanya dalam bidang tanaman pangan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa anggota kelompok tani yang berada di desa Andongrejo sangat rukun, serta hanya sebesar 5% saja yang menyatakan tidak rukun. Dari informasi yang diperoleh ketidakrukunan anggota kelompok, hanya masalah kecil yaitu kesempatan dalam memperoleh jatah pembagian benih. Untuk desa Sanenrejo, sebanyak 40% responden menyatakan sangat rukun dan 50% menyatakan rukun, sisanya 10% menyatakan tidak rukun. Desa Sawangan menunjukkan tingkat ketidakrukunan cukup tinggi sebesar 30%, hal tersebut ditunjukkan oleh ketidaksamaan sikap pengurus dalam menyikapi

adanya perambahan hutan. Perambahan hutan di wilayah HPH Banyumas cukup tinggi, pelaku perambahan hutan umumnya campuran dari pemuda-pemuda tanggung yang ada di desa tersebut dan bergabung dengan pemuda lain di luar desa ditambah lagi pengangguran-pengangguran hasil PHK di kota yang pulang ke desa serta berfungsi sebagai provokator.

Demikian pula hubungan antar anggota dengan pengurus, hasil analisis berdasarkan angka skor menunjukkan bahwa terhadap ketidakkompakan antar anggota dengan pengurus sebesar 40% di desa Kedung Urang, Jawa Tengah dan sebanyak 30% di desa Sawangan. Sedangkan di desa Andongrejo dan desa Sanenrejo hanya sekitar 10-20% anggota menyatakan tidak kompak/tidak rukun antar anggota dengan pengurus kelompok (Tabel 7).

Bila diamati lebih jauh tentang perlunya keberadaan lembaga kelompok tani di desa penelitian, seluruh

anggota/responden menyatakan masih perlu atau masih diperlukan keberadaannya sebesar 100%.

Aspek Partisipasi Masyarakat

Indikator dan kriteria aspek partisipasi petani perkebunan desa hutan ditunjukkan seperti pada Tabel 8 di bawah ini.

Keterlibatan anggota masyarakat dalam kegiatan kehutanan dicerminkan oleh keterikatan masyarakat akan kepentingan terhadap kehutanan. Di desa Hutan Sosial dan Taman Nasional ikatan mereka lebih kuat karena adanya ikatan kepentingan (tanah garapan milik kehutanan, panen alam di Taman Nasional). Tidak demikian di areal HPH, justru yang terjadi sebaliknya dimana kayu yang ditebang oleh masyarakat dianggap pencurian oleh HPH. Seperti ditunjukkan pada Tabel 8 tingkat keterlibatan masyarakat di desa hutan sosial (73.0%) dan di desa Taman Nasional (80.0%) dibandingkan dengan desa Hutan HPH (40.0%).

Demikian pula keterlibatan pemimpin informal lebih tinggi di desa Hutan Sosial dan di desa Taman Nasional dibandingkan dengan desa HPH. Sejalan dengan hal tersebut diikuti pula oleh keterlibatan kelompok tani/hutan. Keterlibatan kelompok tani sesuai dengan peran kelembagaan kelompok bersama, berproduksi dan pemasaran menjadikan keterlibatan kelompok tani sangat besar, terutama di desa hutan sosial (82.0%) dan desa Hutan Taman Nasional (81.0%), sedangkan di desa hutan HPH hanya (55.0%).

Keterlibatan penyuluh kehutanan tidak begitu besar 44.7% di desa Hutan Sosial dan 43.4% di desa Hutan Taman Nasional. Namun jauh lebih besar dibandingkan di desa Hutan HPH (33.0%).

Tabel 7. Tingkat kekompakan kelompok tani perkebunan

Table 7. Relationship level of the farmers groups

Uraian	Jawa Tengah		Jawa Timur	
	Desa Sawangan (%)	Desa Kedung Urang (%)	Desa Andongrejo (%)	Desa Sanenrejo (%)
Hubungan antar anggota				
- Sangat rukun	20	20	45	40
- Rukun	50	60	50	50
- Tidak rukun	30	20	5	10
Hubungan antar anggota dengan pengurus				
- Sangat rukun	10	10	30	20
- Rukun	60	50	60	60
- Tidak rukun	30	40	10	20
Perlunya kelompok tani				
- Ya	100	100	100	100
- Tidak	0	0	0	0

Sumber : Data primer

Source : Primary data

Tabel 8. Kriteria dan indikator petani perkebunan desa dalam dan disekitar hutan pada 3 pola pengelolaan hutan

Table 8. Indicators and criteria of the farmers living in the forest and surrounding area in the 3 forest management systems

Indikator Indicators	Kriteria Criteria		
	Desa Hutan Sosial (Jawa Tengah)	Desa Hutan Taman Nasional (Meru Betiri - Jatim)	Desa Hutan HPH Hutan Alam (Riau)
Keterlibatan anggota masyarakat	73.0	80.0	40.0
Keterlibatan pimpinan informal	70.0	73.0	40.3
Keterlibatan kelompok tani	82.0	81.0	55.0
Keterlibatan kelompok pelestarian lingkungan	-	-	0
Keterlibatan penyuluh kehutanan	44.7	43.4	33.0

Sumber : Data primer

Source : Primary data

KESIMPULAN

Indikator sosial ekonomi petani perkebunan pada 3 pola pengelolaan Hutan belum menunjukkan perbaikan yang berarti dibandingkan dengan petani sawah di lahan sawah dan petani perkebunan di lahan perkebunan. Namun pendapatan rata-ratanya diatas kebutuhan Fisik Minimum/UMR pada standar daerah masing-masing. Demikian pula tingkat pemerataannya kriterianya lebih merata dengan angka Gini (0.295 - 0.430). Kontribusi sumber pendapatan petani perkebunan dalam hutan dan di sekitar hutan ternyata terbesar dari sektor non pertanian dengan selang 32.2 - 60.3% dan berikutnya adalah sektor perkebunan dengan selang 21.2% - 27.5%. Dari 3 pola pengelolaan hutan (Hutan Sosial, Hutan Taman Nasional dan Hutan HPH) ternyata dari keseluruhan indikator sosial ekonomi-

nya ternyata hutan Taman Nasional lebih baik dibandingkan dengan pola lainnya. Pola hutan sosial yang diprogramkan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat belum sepenuhnya berhasil. Pengaruh/peranan lembaga-lembaga pemerintah dalam meningkatkan kinerja usaha masyarakat cukup besar, terlihat dari ragam pembinaan, tingkat kelompok-kelompok tani, partisipasi kelompok terhadap tenaga kerja. Hubungan antar lembaga kelompok tani dan hubungan antar anggota dengan pengurus terlihat cukup baik dan saling menghormati. Tingkat hubungan antara lembaga pengelolaan dengan masyarakat terdapat tingkat partisipasi yang berbeda. Tingkat partisipasi terendah terjadi pada pola/lembaga HPH, dan tertinggi pada hutan Taman Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- ANONYMOUS, 1996. Tinjauan hak-hak tradisional rakyat setempat dalam rangka pemanfaatan hasil hutan di P. Yandema (suatu studi di Prop. Maluku). Penelitian Tim Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan. Kerjasama Badan Litbang Kehutanan dan Universitas Pattimura. 92 p.
- ANONYMOUS, 1998. Pedoman survey sosial ekonomi kehutanan Indonesia (PPSEKI). Buku I. Petunjuk Umum Departemen Kehutanan dan Perkebunan RI. Jakarta. p. 88-108
- CHAMBERS, R. 1994. Challenging the profession, frontiers for rural development. Intermediate Technology Publications. 115p.
- DUMAIRY, 1999. Perekonomian Indonesia. Fakultas Ekonomi UGM. Erlangga - Yogyakarta. 264 p.
- MUBIARTO, 1998. Laporan kaji tindak Program IDT. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, BAPPENAS - Indonesia. 454 p.
- REYNTJES COEN. BERTUS HAVERKORT dan AN WATERS-BAYER (terjemahan Y. Sukoco SS) 1999. Pertanian masa depan, Kanisius Yogyakarta. 216 p.
- SUDHARTO, D. 1996. Dampak ekonomi wilayah dan peran kelembagaan pada kegiatan rehabilitasi hutan di Kabupaten Dati II Bangka. Prop. Sumatera Selatan. Program Pasca Sarjana IPB Bogor. 97 p.
- SUGIARTO, W. 1996. Pengkajian motivasi petani, keberhasilan tanaman dan peranan lembaga terkait pada kegiatan pengelolaan hutan rakyat swadaya, Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB Bogor. 84 p.
- SUTANTO, A. 2000. Penyempurnaan metodologi perhitungan penduduk miskin dan profil kemiskinan. Bagian Analisis dan Pengembangan Statistik Produksi dan Distribusi, BPS. Jakarta - Indonesia. 50p.
- WURARAH, R.N. 1998. Pengembangan model pemanfaatan hutan untuk pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Program Pasca Sarjana IPB, Bogor. 107 p.